



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL STANDAR PENGUKURAN
TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
KEUANGAN DAERAH (PPKD) UNTUK PEMBERIAN REWARD
BERUPA DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

NAMA : Drs. HORAS MAURITS PANJAITAN, M.Ec. Dev
N I P : 19680302 199303 1 002
KELAS : A
N D H : 11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek perubahan ini disusun dengan tema strategi pengembangan model standar pengukuran tata kelola perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam rangka pemberian *reward* berupa Dana Insentif Daerah yang merupakan salah satu wujud konkrit penerapan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Implementasi proyek perubahan dilakukan sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan baik bagi pemerintah daerah maupun bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diimplementasikannya proyek perubahan ini menjadi langkah baru bagi Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri untuk mewujudkan Standar Pengukur Kualitas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang nantinya diintegrasikan dengan Pusat Jejaring Inovasi daerah. Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi proyek perubahan adalah dukungan dari *stakeholder* eksternal maupun Internal, komitmen yang tinggi dari anggota tim efektif proyek perubahandan peran kepemimpinan yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan baik dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan proyek perubahan adalah menyamakan visi, misi dan kesamaan pemahaman diantara Tim Efektif dan *stakeholders* terkait, membangun *networking* dan meningkatkan koordinasi dan sinergisitas baik melalui rapat-rapat dan *focus group discussion* maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi. Proyek perubahan ini dalam jangka pendek telah menghasilkan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, panduan Sistem Penggunaan Entri Data (Simpantri) IPPKD dan hasil simulasi Pengukuran IPPKD.

Proyek perubahan ini didukung melalui pendanaan APBN sehingga diharapkan melalui proyek perubahan ini memiliki hasil dan manfaat bagi Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda, DJPK Kemkeu, BPS, BPK dan *stakeholders* terkait lainnya dalam menilai tata kelola PPKD, peningkatan kapasitas SDM, penyebaran data secara objektif, terukur dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah serta dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pemberian *reward* bagi daerah.